

BAB III

PROSES PERDAMAIAN DI SUDAN SELATAN

IGAD sebelumnya pernah menjadi mediator dalam perang saudara ke dua antara Utara – Selatan di Sudan (1983- 2005). Dalam mediasinya IGAD berhasil membawa Sudan Selatan mencapai kemerdekaannya melalui *Comprehensiv Peace Agreement* 2005. Namun, Sudan Selatan mengalami kembali perang saudara yang dimana IGAD kembali terlibat dalam mediasi konflik tersebut. Selain itu, konflik di Sudan Selatan telah menjadi fokus perhatian negara – negara lain terkait kepentingan kemanusiaan dan keamanan menjadi dasar keterlibatan bagi negara – negara tersebut. Bab ini akan membahas upaya perdamaian yang di lakukan oleh IGAD, pihak lain, serta faktor – faktor yang mempengaruhi terhentinya mediasi sehingga membawa IGAD gagal untuk membawa keberhasilan pada kesepakatan damai kedua belah pihak.

A. Peran IGAD dalam Proses Perdamaian



Gambar 1.2

Sumber : IGAD portal

Pada tahun 1974 – 1984, kawasan Afrika Timur mengalami kekeringan dan bencana alam yang parah sehingga menyebabkan kelaparan, degradasi ekologi, dan kesulitan ekonomi di wilayah tersebut.¹ Kekeringan dan kelaparan ini telah menjadi fokus perhatian bagi negara- negara di kawasan Afrika, khususnya Afrika Timur yang membuat beberapa negara mengambil langkah melalui pendekatan regional dalam mengatasi masalah regional tersebut.²

Pada tahun 1983- 1984, enam negara di Tanduk Afrika yaitu Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan dan Uganda (Eritrea bergabung pada akhir 1993) mengambil tindakan melalui PBB untuk mendirikan sebuah organisasi regional *Intergovernmental Authority on Drought and Development* (IGADD) . Pada 16 Januari 1986, Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan bertemu untuk menandatangani Perjanjian secara resmi dibentuknya IGADD dengan Markas Besar di Djibouti.³

IGADD bertujuan sebagai badan kerjasama untuk menyelesaikan isu – isu mengenai kekeringan dan penggurunan. Pertengahan tahun 1990-an, anggota IGADD memutuskan untuk merevitalisasi yang bertujuan tidak hanya pada keamanan regional dan dialog politik tetapi juga pada pembangunan ekonomi dan perdagangan dalam sub – region.⁴ Semakin meningkatnya permasalahan yang terjadi di sub – region yang antara lain perang sipil yang terjadi di Uganda, Ethiopia yang menghasilkan kemerdekaan

¹ Africa Union, Intergovernmental Authority For Development (IGAD), <http://au.int/en/recs/igad> (di akses 2 januari 2016)

² IPI (*International Peace Institute*), *East africa and the Intergovernmental Authority on Development* hal. 1

³ Op.Cit. Africa Union

⁴ Heinrich Boll Foundation. *In Quest for a Culture of Peace in the IGAD Region : The Role of Intellectuals and scholars*. Nairobi, Kenya: Heinrich Boll Foundation, 2006. hal. 73

Eritrea pada tahun 1991, dan perselisihan antar negara anggota menyebabkan pembicaraan dalam IGADD tidak lagi hanya sebatas pada masalah kekeringan dan pembangunan.

Pada 18 April 1995, kepala negara dan pemerintah bertemu di KTT luar biasa di Addis Ababa dan menyetujui untuk merevitalisasi otoritas dan memperluas wilayah kerjasama sub – region. Salah satu motivasi utama untuk merevitalisasi IGADD adalah keberadaan IGADD yang memiliki banyak masalah pada organisasi dan struktural yang membuat pelaksanaan tujuan dan prinsip-prinsip menjadi tidak efektif.⁵

Pada 21 Maret 1996, kepala negara dan pemerintah bertemu di KTT luar biasa ke-dua di Nairobi, Kenya menyetujui dan mengadopsi perjanjian mendirikan *Intergovernmental Authority On Development (IGAD)* dengan memiliki 3 area prioritas kerjasama yaitu⁶:

- 1) Pencegahan, manajemen, resolusi konflik dan urusan kemanusiaan.
- 2) Pembangunan infrastruktur(komunikasi dan transportasi)
- 3) perlindungan lingkungan dan keamanan pangan.

1. IGAD sebagai Mediator Konflik Sudan Selatan

Konflik di Sudan Selatan telah menjadi fokus perhatian banyak pihak untuk menyelesaikannya. Hal ini menimbulkan kepedulian pihak lain, khususnya IGAD dalam penyelesaian konflik dinegara muda tersebut. Adanya peran mediator dalam konflik Internasional menjadi hal yang mungkin untuk membantu suatu negara dalam mengatasi konflik tersebut.

⁵ *Ibid*

⁶Ulf Engel And Joao Gomes Porto, *Africa's New Peace And Security Architecture*, Inggris: Ashgate Publish Company, 2010, hlm 26

Krisis yang terjadi di Sudan Selatan semakin meningkat pada 15 Desember 2013, membuat negara – negara IGAD mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. IGAD membentuk tim mediasi yang terdiri dari Ethiopia, Uganda, Sudan, dan Kenya untuk membantu Sudan Selatan dalam menyelesaikan konfliknya. Dimana Ethiopia sebagai ketua tim dalam proses mediasi yang terdiri dari menteri luar negeri keempat negara tersebut. Ban Ki Moon selaku sekretaris jenderal PBB mendukung upaya IGAD untuk menjadi mediator dalam melakukan mediasi pada krisis di Sudan Selatan. Dalam hal ini, IGAD tidak hanya terlibat dalam mediasi , tetapi juga dalam proses negosiasi antara pemerintah dan pemberontak.⁷

1. Upaya IGAD Dalam Mediasi Konflik Sudan Selatan

Intergovernmental Authority on Development (IGAD) telah memainkan peran utama dalam mengamankan perdamaian bagi negara Sudan Selatan yang retak dan sebelum terlibat dalam mediasi yang membuat pembentukan negara bagi Sudan Selatan. 15 Desember 2013, Konflik Sudan Selatan semakin meningkat yang di karenakan kekerasan pecah di garis suku antara Dinka dan Nuer yang menyebabkan konflik mematikan. Melihat kondisi Sudan Selatan yang semakin parah membuat IGAD mengirimkan menteri luar negerinya yang terdiri dari negara Republic Federal Ethiopia, Kenya dan Sudan secara formal ke Juba, Republik Sudan Selatan pada 19 Desember untuk berkonsultasi dengan para pemimpin Sudan Selatan yang terlibat konflik.

Menteri Luar negeri Ethiopia, Kenya,dan Sudan melakukan kunjungan selama tiga hari ke Juba, Republik Sudan Selatan untuk mengatur pembicaraan dengan pemerintah Sudan Selatan. Pertemuan tersebut membicarakan agenda politik yang akan

⁷ Op.Cit. Formella Collins

di bicarakan dalam pembicaraan damai dengan pemimpin – pemimpin faksi SPLM. Dalam menindak lanjuti pembicaraan tersebut, kepala negara Afrika Timur melakukan Konferensi Tingkat Tinggi IGAD dalam menentukan pembicaraan damai penyelesaian konflik Sudan Selatan.

Pada 27 Desember 2013, Ketua majelis dan pemerintah menyelenggarakan pertemuan KTT IGAD di Nairobi, Kenya yang di hadiri oleh seluruh kepala negara anggota IGAD. Peserta pertemuan menawarkan bantuan mediasi untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung satu setengah tahun. Pertemuan tersebut membicarakan *Agreement Cessation of Hostilities (COH)* , pembentukan Pemerintah Transisi Nasional ,dan kesepakatan pembagian kekuasaan sebagai solusi krisis politik yang terjadi di Sudan Selatan.⁸

Selain itu, hasil komite yang di keluarkan di Nairobi memberikan faksi Riek Machar waktu empat hari untuk meletakkan senjata mereka, yang selanjutnya IGAD memperingatkan akan mengambil tindakan lebih untuk menghentikan konflik. Para pemimpin IGAD menolak untuk menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di negara tersebut, dan mengatakan perubahan harus datang melalui proses demokrasi.

Presiden Salva Kiir secara formal menyetujui tawaran perundingan tanpa syarat untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung dengan di bawah mediasi IGAD. Faksi SPLM menerima tawaran IGAD untuk menyelesaikan konflik, dimana pimpinan faksi SPLM adalah Riek Machar. Penerimaan tawaran IGAD sebagai mediator oleh pemerintah Sudan Selatan dan SPLM di wujudkan dengan pertemuan pendahuluan pada

⁸ Sudan Tribune, *Pemimpin IGAD Mempertimbangkan Kesepakatan Pembagian Kekuasaan untuk Mengakhiri Krisis Sudan Selatan*, [www. SudanTribune.com](http://www.SudanTribune.com), (di akses pada 2 Maret 2016)

4 Januari 2014 untuk menentukan agenda perundingan. Putaran pembicaraan perdamaian konflik Sudan Selatan dilakukan selama enam putaran dengan empat putaran gagal.

Putaran pertama terjadi pada 23 Januari 2014 di Adis Ababa, Ethiopia, dimana dalam mediasi yang dilakukan oleh IGAD, pihak oposisi dan pemerintah dipertemukan yang dalam putaran pertama ini pembicaraan hanya mencakup tiga poin substantif yaitu *Agreements on Cessation of Hostilities*, pelepasan tahanan politik yang merupakan milisi Riek Machar serta Penarikan pasukan militer Uganda (UPDF). Namun, perjanjian tersebut gagal di implementasikan.

Putaran pembicaraan kedua dilaksanakan pada 10 Juni 2014, dalam putaran ini kembali pada pembicaraan aktual terkait keberlanjutan perjanjian yang telah ditandatangani namun dilanggar. Pada kenyataannya pihak-pihak yang berkonflik masih terus melakukan penyerangan dengan menargetkan warga sipil yang seringkali didasarkan pada identitas etnis mereka.⁹ IGAD memerintahkan kepada kedua pihak untuk tidak saling mencari kemenangan politik, karena yang terpenting adalah perdamaian.

Pada 9 Mei 2014 diadakan kembali perundingan yang memfokuskan pada perjanjian gencatan senjata berkelanjutan antara pemerintah dan pemberontak antara kedua belah pihak. Pertemuan ini dimediasi oleh blok regional Afrika Timur IGAD (otoritas Antar pemerintah untuk pembangunan).¹⁰ Namun, hasil dari perundingan tersebut hanyalah sebatas perundingan ditempat, hal ini disebabkan karena selepas perundingan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

⁹*Op.Cit.*, Delta Anggara Putri, hal.2

¹⁰ VOA Indonesia, "*Pembicaraan Perdamaian di Sudan Selatan Dimulai Kembali*", <http://www.voaindonesia.com>. (di akses pada 5 Maret 2016)

Selanjutnya, pembicaraan tersebut dilanjutkan kembali pada 01 Februari 2015 sesuai dengan agenda mediasi IGAD.¹¹ Dimana Presiden Salva Kiir dan mantan wakil presidennya Dr. Riek Machar menyetujui akan pembicaraan lanjutan dari negosiasi perdamaian guna mencapai kesepakatan persatuan pemerintahan. Keduanya sepakat akan menjawab akhir dari perundingan selambat - lambatnya pada 05 Maret 2015.

Pasca perundingan pada 1 Februari 2015, IGAD kembali mengadakan perundingan pada tanggal 2 Februari 2015 terkait negosiasi konflik tersebut yang disepakati secara final paling lambat tanggal 5 Maret 2015, dan mendirikan pemerintahan transisi pada tanggal 9 Juli 2015.¹² Hasil dari perundingan tersebut, Presiden Salva Kiir dan mantan wakil presidennya Riek Machar telah mencapai kesepakatan bersama untuk melakukan perjanjian gencatan dan membentuk Pemerintahan baru yakni presiden tetap dijabat oleh Salva Kiir dan Riek Machar masuk kembali menjabat sebagai wakil presiden.

Kesepakatan gencatan senjata tersebut ditandatangani pada 2 Februari 2015 dalam pertemuan di Addis Ababa, Ethiopia, dengan bantuan dari blok Afrika Timur (IGAD).¹³ IGAD sebagai mediator perdamaian di Sudan Selatan akan memberikan sanksi apabila kedua belah pihak melanggar perjanjian yang disepakati, sanksi tersebut kemudian dilaporkan pada Dewan Keamanan PBB dan Uni Afrika.¹⁴

¹¹ IGAD, "Message From H.E Dessalegn, Prime Minister of The Federal Democratic Republic of Ethiopia and Chairperson of The IGAD Assembly To The People of South Sudan", <http://southsudan.igad.int/> (di akses pada 6 Maret 2016)

¹² Antara News, "Pembicaraan perdamaian Sudan Selatan dihentikan", <http://www.antaraneews.com> (di akses pada 6 Maret 2016)

¹³ VOA Indonesia, "Presiden Sudan Selatan Dan Panglima Pemberontak Sepakati Perdamaian", <http://www.voaindonesia.com>. (di akses pada 6 Maret 2016)

¹⁴ Metro Tv News : "Sudan Selatan dan Pemberontak Sepakati Gencatan Senjata" <http://internasional.metrotvnews.com>. (di akses pada 7 Maret 2016)

Pada 20 Februari 2015, pihak pemerintah salva kiir dan oposisi riek machar kembali dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan harapan agar kesepakatan tersebut telah disetujui sebelum tanggal 5 Maret 2015. Jon Lunn memaparkan bahwa saat itu IGAD mencoba mendamaikan kedua pihak dengan pendekatan “IGAD *Plus*” (yang dilakukan dengan bantuan Troika (Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia). Pendekatan ini melibatkan koordinasi yang lebih besar dan peningkatan tekanan oleh semua pemangku kepentingan internasional yang terlibat.¹⁵

Pada pertemuan final 5 Maret 2015, Kedua belah pihak tidak menghadiri seperti yang telah di jadwalkan untuk mencapai kesepakatan damai, dimana hal tersebut di karenakan pemberontak secara tegas menolak penawaran pembagian kekuasaan dalam pembentukan pemerintah transisi antara Salva Kiir dan Riek Machar yang di anggap tidak adil. Penolakan yang dilakukan oleh pemberontak secara otomatis menggugurkan persetujuan yang di sepakati pada pertemuan sebelumnya.

B. Komunitas Internasional di Konflik Sudan Selatan

Perbedaan kepentingan yang di bawa baik pihak yang berkonflik di tambah aktor internasional yang terlibat konflik membuat proses perdamaian berlangsung lama. Aktor internasional juga membawa kepentingannya ketika terlibat dalam konflik tersebut. Adapun aktor internasional yang terlibat dalam konflik Sudan Selatan yaitu pendukung IGAD (PBB, Uni Afrika, Uni Eropa, Troika), Amerika Serikat serta China.

¹⁵*Op.cit.*, John Lunn, hlm 3

1. IGAD

Dalam konflik Sudan Selatan ini, IGAD bertindak sebagai mediator konflik. IGAD merupakan organisasi sub regional afrika timur yang berfokus pada penyelesaian masalah kekeringan dan kelaparan. Konflik yang terjadi di afrika timur membuat IGAD membentuk organisasi tersebut menjadi organisasi yang tidak hanya menyelesaikan masalah kelaparan dan pembangunan tetapi juga resolusi konflik.¹⁶ Anggota dari IGAD merupakan negara – negara yang berbatasan dengan sudan selatan. antara lain : Ethiopia, Somalia, Eritrea, Uganda, Djibouti, Kenya dan Sudan.

IGAD dalam melakukan mediasi menawarkan dan mendorong perjanjian untuk pembentukan pemerintahan transisi yang mengakomodasi permintaan dari pihak oposisi, Riek Machar untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, tujuan IGAD dalam proses perdamaian Sudan Selatan adalah perdamaian dapat terwujud di negara Sudan Selatan.

Konflik yang terjadi antara pemerintah Sudan Selatan dan pemberontak menimbulkan masalah tersendiri bagi negara anggota IGAD, antara lain masalah pengungsi. Oleh karenanya, kepentingan yang di bawa oleh IGAD berupa masalah keamanan regional. Dimana konflik yang terjadi melibatkan negara – negara tetangga antara lain Ethiopia, Eritrea , Uganda, Kenya dan Sudan .

Negara – negara tersebut saling konflik satu sama lain terkait perbedaan kepentingan pada konflik Sudan Selatan. Untuk itu IGAD mempunyai kepentingan menjaga keamanan regional di antara negara – negara anggota. Konflik yang merambat di negara – negara tetangga yang juga merupakan tim mediasi dari IGAD

¹⁶ *Op.Cit* PIP hal. 12

mengakibatkan terhambatnya penyelesaian konflik akibat kepentingan dari masing – masing anggota tersebut. Sebagai organisasi regional yang bergerak di bidang resolusi konflik, IGAD wajib melakukan penyelesaian masalah – masalah tersebut.

2. Amerika Serikat

Amerika dalam hal ini sebagai pemantau proses perdamaian. Meskipun sebagai pemantau , pemerintah Amerika mempunyai kepentingan terhadap perdamaian di Sudan Selatan. Dimana keterlibatan Amerika Serikat sangat besar pada kemerdekaan rakyat Sudan Selatan melalui perjanjian *Comprehensive Peace Agreement*. Kepentingan lain Amerika Serikat adalah didasarkan pada ambisi China terkait industri minyak yang menjadi sangat berpengaruh di wilayah tersebut.

Amerika Serikat memandang pada berbagai sektor di Sudan Selatan. Dimana China dan Malaysia menjadi investor teknologi maju pada pembangunan di Sudan Selatan. Namun, Kepentingan utama Amerika Serikat dalam hal ini yaitu menjaga keamanan regional dan perdamaian. Dalam hal ini, secara tidak langsung pemerintah Amerika mendukung IGAD dalam penyelesaian konflik pihak yang bertikai.

Upaya yang di lakukan Amerika Serikat dalam memajukan penyelesaian damai yaitu dengan pembiayaan terhadap Pemantauan dan Verifikasi Mekanisme (MVM) IGAD yang berbasis di Juba selain memastikan tekanan pada pihak. Dalam hal ini, intervensi AS dan para pemimpin regional telah mendesak para pemimpin Sudan Selatan untuk berkomitmen dalam mengatur negara mereka dengan jalan perdamaian dan kemakmuran. Selain itu, Amerika Serikat juga mendukung beberapa pendekatan organisasi pemberdayaan masyarakat sipil dan mendukung IGAD untuk bersifat inklusif dalam proses mediasi.

Amerika Serikat dalam penyelesaian damai tersebut mengambil beberapa langkah penting dengan memberlakukan sanksi terhadap dua jenderal dari kedua belah pihak yang bertikai, yaitu Jenderal Marial Chanuon Yol yang merupakan Komandan SPLA Pengawal Presiden dan Peter gadet ,mantan pasukan wakil presiden Riek Machar di negara Unity. Sanksi tersebut dikarenakan keseriusan AS atas ketidakpuasaan dengan pihak yang bertikai dalam penyelesaian konflik.

Seperti yang dinyatakan oleh Samantha Power, Duta Besar AS untuk PBB, yaitu Langkah-langkah yang diambil terhadap Marial Chanuon dan Peter gadet merupakan langkah pertama dan harus menjadi peringatan yang jelas kepada mereka di Pemerintah Sudan Selatan dan mereka yang telah mengangkat senjata untuk melawan, yang mana Amerika Serikat bertekad untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang memilih kekerasan.¹⁷ Sanksi yang di berikan oleh Amerika Serikat di antaranya yaitu larangan berpergian ke Amerika Serikat dan pembekuan aset oleh lembaga keuangan AS.¹⁸

Kepentingan Amerika Serikat :

- a. Sumber Daya Alam
- b. Perdamaian
- c. Keamanan Sudan Selatan
- d. Pengaruh Regional

¹⁷ Sudan Tribune, *US slaps sanctions on two generals from South Sudan*, <http://www.sudantribune.com/spip.php?article50905>

¹⁸ Aleu Garang, *The impact of external actors on the prospects of a mediated settlement in South Sudan*. 2015, South Sudan .hal 15

3. Pendukung IGAD

PBB, Uni Afrika, Uni Eropa, dan Troika Menjadi pemantau dalam proses perundingan konflik Sudan Selatan. Kepentingan keempatnya sangat berhubungan dengan proses kemanusiaan, hak asasi manusia, dan masalah pengungsi. Dimana organisasi ini telah memberikan bantuan keuangan dan keamanan. Kepentingan akan masalah pengungsi terkait hak asasi manusia menjadi perhatian keempat organisasi ini.

Keempat organisasi ini menganggap bahwa masalah krisis kemanusiaan sangat penting. Dimana Uni Eropa memberikan € 45 juta dari Dana Pembangunan Eropa (EDF) dalam memperkuat respon Uni Eropa terhadap krisis kemanusiaan.¹⁹ Selain itu, Uni Eropa juga memberlakukan sanksi larangan perjalanan, pembekuan aset di Uni Eropa, dan embargo senjata, yang ditargetkan pada tindakan individu yang dianggap menghalangi proses perdamaian, melanggar perjanjian gencatan senjata dan melakukan pelanggaran HAM yang berat.²⁰

Dalam hal ini, PBB juga menjalankan misinya melalui UNMISS untuk perdamaian di Sudan Selatan. PBB terus memberikan bantuan logistik kepada MVM dari pembebasan mandat mereka untuk melindungi warga sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan sedapat mungkin.²¹ DK PBB mencoba untuk memainkan peran pengaruhnya melalui pemberian sanksi yang ditargetkan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai spoiler atau menghalangi perdamaian. Dimana sanksi yang diterima adalah berupa penolakan regional dan nasional bahkan embargo senjata yang lebih luas,

¹⁹ Fact Sheet, *The EU and South Sudan – The European External Action*, Brussels, 2014 hal.3

²⁰ *Ibid* EU Fact Sheet. hal.2

²¹ *Ibid*

hal tersebut merupakan upaya untuk mengakhiri krisis melalui dukungan Serikat Afrika serta IGAD.²² Kepentingan Pendukung IGAD:

- a. Keamanan Regional
- b. Perdamaian dan Kemanusiaan
- c. Pembangunan ekonomi / sosial
- d. Masalah pengungsi

4. China

Dalam hal ini, China tidak terlibat langsung dalam konflik Sudan Selatan tetapi memiliki kepentingan pada konflik tersebut. China merupakan sekutu paling dekat dengan Goss. Oleh karenanya, China mempertahankan hubungan baiknya dengan Goss, yang mana China mengeksport berupa senjata dan amunisi untuk Goss pada konflik Sudan Selatan dan sebagai gantinya China mendapatkan impor sekitar 6 % dari kebutuhannya pada minyak dari Sudan Selatan.²³ Selain itu, China memberikan kontribusi berupa dukungan keuangan pada proses mediasi IGAD untuk kemajuan penyelesaian konflik secara damai dan mencapai solusi yang cepat.

IGAD menerima dukungan satu juta dolar untuk proses mediasi dari China pada awal 2014, dan terus terlibat perwakilan tingkat tinggi Utusan Khusus untuk konflik Sudan Selatan.²⁴ China dalam hal ini mendukung Sudan Selatan karena kepentingan akan sumber minyak ke negara tersebut. akan tetapi kekhawatiran akan menjalin hubungan dengan Amerika kemudian lebih mendukung pada IGAD. Hal ini

²² *Op.,Cit.* Aleu Garang.hal 24

²³ Zhongying Pang, *The Non-Interference Dilemma: Adapting China's Approach to the New Context of Africa and International Relations in, Mulegata Gebrehiwoot Brehe and Liu Hongwa (editors), China-Africa Relations*, IPSS, Addis Ababa University, 2013.hal 46

²⁴ *Op.,Cit.* Aleu Garang.hal 16

memperlihatkan kehadiran nyata china pada Sudan Selatan. Dimana hal tersebut untuk menekan pengaruh Amerika Serikat yang lebih besar terhadap sumber daya minyak Sudan Selatan. Kepentingan China :

- a. Mendukung Pemerintah Sudan Selatan
- b. Perdamaian
- c. Sumber Daya Alam
- d. Keamanan regional

Konflik yang terjadi di Sudan Selatan telah menewaskan ribuan orang dan memaksa sekitar satu juta orang meninggalkan rumah mereka sejak pertempuran terjadi pada 15 Desember 2013 di Ibukota Juba sebelum menyebar ke negara – negara bagian lain di negara kaya minyak itu .Peperangan yang berkecamuk di Sudan Selatan adalah akibat perseteruan dua kekuatan politik yang di bumbui kesukuan. Suku Dinka di wakili Presiden Salva Kiir sedangkan suku Nuer di pimpin oleh Riek Machar. Dimana dalam hal ini, IGAD sebagai mediator dalam proses perundingan dengan dukungan berbagai pihak lain .

Oleh karena itu, IGAD sebagai mediator di harapkan dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara netral tanpa membawa kepentingan politisi antar anggotanya. Selain itu, IGAD juga mendapat dukungan pihak internasional yang terdiri dari PBB, AU, EU, Troika. Keempat organisasi tersebut mempunyai pandangan bahwa perdamaian dapat terwujud apabila Riek Machar sebagai ketua pemberontak menghargai demokratisasi terkait keinginanya untuk menurunkan Salva Kiir dari jabatannya.